

PENULISAN SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO.91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



Diajukan Oleh:

Monyca Diana Novarina

NPM

: 210514378

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Ketatanegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

PENULISAN SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO.91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



Diajukan Oleh:

Monyca Diana Novarina

NPM : 210514378

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ketatanegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO.91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



Diajukan Oleh:

Monyca Diana Novarina

NPM : 210514378
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ketatanegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I Tanggal : 23 April 2025

Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum. Tanda tangan : [Signature]
Dosen Pembimbing II Tanggal : 23 April 2025

Bonaventura Pradana S, S.H., M.H Tanda tangan : [Signature]

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO.91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 20 Mei 2025

Tempat : Pendadaran 1 Ruang Dosen Fakultas Lt. II

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum

Sekretaris : Bonaventura Pradana Suhendarto, S.H.,
M.H

Anggota : Y. Hartono, S.H, M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya, yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “KAJIAN YURIDIS IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN” ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Selama penyusunan skripsi, banyak rintangan yang dihadapi, namun berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmat-Nya dalam proses penulisan skripsi ini.
2. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum., dan Bapak Bonaventura Pradana S, S.H., M.H, Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu dan membimbing selama proses studi.

6. Dr. Jati Nugroho, S.H., M.Hum., Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jendral Sudirman Kabupaten Lumajang sebagai narasumber.
7. Kedua orang tua tercinta, Benny Sutanto dan Sunarti, atas kasih sayang yang tidak henti hentinya, doa, kesabaran, dukungan, nasehat, dan terus membimbing penulis dari semasa kecil. Terutama atas segala usaha untuk mendukung pendidikan penulis sampai menyelesaikan studi sampai sarjana.
8. Abang terkasih, Ricky Bhatukh yang telah menjadi bagian besar dalam perjalanan menyelesaikan studi, untuk semua waktu, dukungan, doa serta kelapangan hati kepada penulis.
9. Saudari dan teman-teman tersayang, Kesi Nadeak, Sherly Awen, Reka Lia, dan Delika Dewi, atas semua suka duka, segala cerita, juga dukungan selama ini.
10. Dmtriev Abraham Hariyanto atau Abe Cekut yang selalu menghibur melalui perilakunya yang lucu serta menginspirasi sehingga memotivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini .

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan. Penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta memohon maaf jika ada kata atau kalimat yang tidak berkenan dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 23 April 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Monyca Diana Novarina', with a stylized flourish at the end.

(Monyca Diana Novarina)

ABSTRACT

This research discusses Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, which was the result of a formal review of the Job Creation Law. The Court found that the law-making process did not follow the 1945 Constitution and Law No. 12 of 2011, and therefore ordered the government to make improvements. This decision led to changes in how laws are made in Indonesia. This research aims to analyze the substance of the Constitutional Court's decision in relation to the formation process of Law No. 13 of 2022, as well as the challenges encountered after its enactment. This study employs normative legal research with a statutory approach. The analysis focuses on the application of the omnibus law method, meaningful public participation, RIA, and the ROCCPI approach. The findings indicate that the formation of the Job Creation Law did not comply with standard legislative drafting techniques and fundamental legal principles. Law No. 13 of 2022 was introduced as a corrective measure by incorporating previously neglected elements. However, the rapid drafting process raised concerns regarding its implementation, including material and formal obstacles, limited public participation, lack of transparency, constrained resources, and regulatory complexity. The study concludes that Law No. 13 of 2022 represents an improvement in the legislative process aligned with the Constitutional Court's decision. Nevertheless, its implementation still faces significant challenges, necessitating further reform efforts to ensure optimal application.

Keywords : Legislation Process, Constitutional Court Decision, Job Creation Law, Law No. 13 of 2022, Implementation Challenges.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dikeluarkannya Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 sebagai hasil pengujian formil terhadap UU Cipta Kerja yang proses pembentukannya tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011, sehingga amarnya memerintahkan perbaikan yang kemudian berdampak pada perubahan proses pembentukan perundang-undangan. Penelitian ini berfokus pada analisis substansi Putusan MK terhadap proses pembentukan UU No. 13 Tahun 2022 serta kendala pelaksanaan pasca disahkannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan, serta mengevaluasi pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kerangka hukum, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan *omnibus law*, *meaningful participation*, dan metode *RIA* serta *ROCCIP*. Hasil uji formil MK menemukan bahwa UU Cipta Kerja dengan metode *omnibus law* proses pembentukannya tidak sesuai dengan teknik baku, serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Menindaklanjuti Putusan tersebut, UU No. 13 Tahun 2022 dibentuk sebagai bentuk perbaikan yang menambahkan substansi baru terkait *omnibus law*, *meaningful participation*, metode *RIA*, dan *ROCCIP* agar dapat digunakan sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan selanjutnya. UU No. 13 Tahun 2022 yang disusun dalam periode singkat menimbulkan kekhawatiran dalam pelaksanaannya, serta kendala meliputi hambatan material dan formal dalam *omnibus law*, minimnya partisipasi masyarakat, persoalan transparansi, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas dalam menganalisis regulasi yang sudah ada. Melalui penelitian ini diketahui UU No. 13 Tahun 2022 merupakan UU baru bentuk perbaikan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yang substansinya disesuaikan sebagaimana Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 juga adanya kendala pelaksanaan pasca UU No. 13 Tahun 2022, yang harapannya dapat dilakukan upaya perbaikan agar pelaksanaannya lebih optimal.

Kata kunci: Pembentukan Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi, UU Cipta Kerja, Kendala Implementasi.

DAFTAR ISI

PENULISAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
<i>ABSTRACT</i>.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis.....	5
2. Manfaat Praktis.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sumber Data	14
3. Cara Pengumpulan Data	15
4. Analisis Data	16
BAB II	17
PEMBAHASAN	17
A. Tinjauan Undang-Undang Cipta Kerja	17
B. Analisis Putusan MK 91/UU-XVIII/2020.....	19
1. Permohonan Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020	20
2. Isi Amar Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020	25
3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Merumuskan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2021.....	29

C. Pengaruh Substansi Putusan MK 91/UU-XVIII/2020 Terhadap UU No 13 Tahun 2022.....	40
D. Kendala Dalam Pembentukan Undang-Undang Setelah Diundangkannya UU Nomor 13 Tahun 2022	59
1. Kendala dalam Penerapan Metode <i>Omnibus law</i>	60
2. Kendala dalam penerapan <i>meaningful participation</i>	68
3. Kendala dalam penerapan metode <i>RIA</i> dan <i>ROCCIP</i>	76
BAB III.....	83
A. Simpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	54 - 55
--------------	---------

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli Penulis dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi karya penulis lain. Jika terbukti bahwa ini merupakan plagiasi atau duplikasi karya penulis lain, penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau hukum yang berlaku.

Penulis



Monyca Diana N